J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Strategi Kesiapsiagaan Bencana Alam Gempa Bumi dalam Rangka Menjamin Hak Hidup di Lembaga Pemasyarakan Kelas II B Tanjung Pati

Thavarel Azuri Pratama[1], Markus Marselinus Soge[2]
[1,2]Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
E-mail: thavarelazuri07@gmail.com[1], markusmarselinus@gmail.com[2]

Article History:
Received: 10 Desember 2024
Revised: 26 Desember 2024
Accepted: 30 Desember 2024

Keywords: *Kesiapsiagaan Bencana, Gempa Bumi, Hak Hidup, Lembaga Pemasyarakatan, Strategi Mitigasi.*

Abstract: *Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Pati terletak di daerah rawan gempa bumi sehingga memerlukan strategi kesiapsiagaan untuk menjamin hak hidup para narapidana dan petugas. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi kesiapsiagaan bencana gempa bumi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Pati serta dampaknya terhadap perlindungan hak hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen, yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat langkah-langkah kesiapsiagaan seperti penyediaan titik evakuasi dan sosialisasi kepada narapidana, implementasi strategi ini masih mengalami hambatan, terutama akibat masalah overkapasitas dan kurangnya pelatihan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan dan kerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan kesiapsiagaan bencana yang lebih optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi bencana, serta menjamin hak hidup para penghuninya dalam situasi darurat.*

PENDAHULUAN

Indonesia terletak di kawasan ring of fire, yang menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana alam, khususnya gempa bumi, yang sangat tinggi. Sebagai salah satu wilayah yang rawan gempa, Sumatera Barat terletak di jalur pertemuan dua lempeng tektonik besar, yaitu Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Salah satu dampak signifikan dari bencana gempa bumi adalah kerusakan infrastruktur, termasuk bangunan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Lapas, sebagai tempat pembinaan narapidana, memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keselamatan dan hak hidup narapidana serta petugas, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam.

Lapas Kelas II B Tanjung Pati terletak di daerah yang sangat rawan gempa. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana alam menjadi krusial untuk meminimalkan korban jiwa

dan melindungi hak hidup narapidana serta petugas. Saat terjadi gempa, bangunan yang tua dan overkapasitas membuat evakuasi menjadi sulit, serta meningkatkan risiko kerusakan infrastruktur yang membahayakan keselamatan penghuni lapas. Strategi kesiapsiagaan yang tepat menjadi kunci untuk menghadapi risiko ini.

Salah satu isu yang muncul di Lapas Kelas II B Tanjung Pati adalah overkapasitas yang mencapai 275%, dengan kapasitas hanya untuk 86 orang tetapi dihuni oleh lebih dari 300 narapidana dan tahanan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kesulitan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari tetapi juga menambah risiko ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Jalur evakuasi yang sempit dan terbatas, serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi tentang mitigasi bencana bagi petugas dan narapidana, menjadi masalah utama dalam upaya kesiapsiagaan bencana di Lapas ini. Strategi mitigasi bencana yang ada saat ini belum optimal karena minimnya dukungan infrastruktur dan kurangnya pelatihan bagi petugas. Hal ini mengakibatkan kesiapan dalam menghadapi bencana alam gempa bumi belum memadai untuk menjamin keselamatan seluruh penghuni Lapas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis strategi kesiapsiagaan bencana gempa bumi di Lapas Kelas II B Tanjung Pati, guna menjamin hak hidup penghuni lapas.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya kesiapsiagaan bencana di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Penelitian oleh Murdhani (2019) di Lombok Tengah menyatakan bahwa mitigasi bencana sangat bergantung pada sistem informasi manajemen bencana yang baik, yang dapat mempercepat proses evakuasi dan pengamanan selama gempa. Penelitian ini juga menekankan perlunya pelatihan yang terintegrasi bagi petugas untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Tarigan et al. (2022) juga menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam konteks pemenuhan hak-hak dasar narapidana selama bencana, termasuk hak hidup dan keselamatan mereka. Penelitian lain yang dilakukan oleh Risansaka dan Subroto (2022) di Lapas Kelas I Madiun menyoroti kesiapan Lapas dalam menghadapi kebakaran, yang mengimplikasikan pentingnya strategi mitigasi bencana yang lebih luas. Temuan tersebut sejalan dengan kebutuhan mitigasi bencana di Lapas Tanjung Pati yang belum maksimal. Selain itu, penelitian tentang kesiapsiagaan bencana di kalangan masyarakat oleh Istiqomah (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan dan sosialisasi mitigasi bencana sangat penting dalam membangun kesadaran dan kesiapsiagaan, hal ini relevan juga bagi lapas yang memiliki risiko tinggi dalam menghadapi gempa.

Manajemen strategi, seperti yang dikemukakan oleh Fred R. David (2011), mencakup tiga tahap penting: perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Dalam konteks kesiapsiagaan bencana, manajemen strategi ini diterapkan untuk merumuskan strategi mitigasi yang dapat melindungi narapidana dan petugas dari risiko gempa bumi. Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan mencakup perencanaan yang terarah dalam menghadapi bencana, mulai dari identifikasi risiko hingga sosialisasi dan pelatihan yang intensif.

Selain itu, teori Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, terutama Pasal 9, menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hidup dan keselamatan. Dalam konteks Lapas, ini berarti bahwa lembaga tersebut harus mampu menjamin keselamatan narapidana dari ancaman bencana alam, termasuk dengan menyediakan infrastruktur yang aman dan pelatihan mitigasi yang memadai. Dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya dan teori manajemen strategi serta HAM, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif strategi kesiapsiagaan bencana di Lapas Kelas II B Tanjung Pati dan implikasinya terhadap hak hidup narapidana.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori yang relevan, di antaranya adalah teori manajemen strategi oleh Fred R. David (2011), yang menggarisbawahi pentingnya perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk memastikan kesiapsiagaan bencana yang efektif di lembaga pemasyarakatan. Kesiapsiagaan bencana juga merupakan landasan penting dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pentingnya persiapan dan mitigasi risiko sebelum bencana terjadi. Selain itu, teori Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 9, mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hidup, yang relevan dengan upaya menjamin keselamatan narapidana dalam situasi darurat. Teori overcrowding yang diungkapkan oleh McMullan (2011) juga relevan, mengingat Lapas Kelas II B Tanjung Pati mengalami overkapasitas hingga 275%, yang menambah risiko keselamatan selama bencana alam. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan manajemen strategi, kesiapsiagaan bencana, HAM, dan risiko overcrowding sebagai landasan teori untuk mengembangkan strategi kesiapsiagaan bencana gempa bumi yang efektif di Lapas Kelas II B Tanjung Pati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis strategi kesiapsiagaan bencana alam gempa bumi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Pati. Sumber data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan narapidana, petugas lapas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, serta studi dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari setiap tahap ini kemudian disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kesiapsiagaan bencana di lapas tersebut serta kendala yang dihadapi. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang terjadi dan mengevaluasi efektivitas strategi yang sudah diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Pati, ditemukan bahwa meskipun ada beberapa langkah kesiapsiagaan bencana gempa bumi yang sudah diterapkan, implementasinya masih jauh dari kata memadai. Salah satu permasalahan paling krusial adalah overkapasitas yang dialami lapas ini. Lapas Kelas II B Tanjung Pati memiliki kapasitas maksimum untuk 86 orang, namun saat ini dihuni oleh lebih dari 300 narapidana dan tahanan. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak hanya penuh sesak, tetapi juga menambah risiko dalam hal evakuasi jika terjadi gempa. Jalur evakuasi yang tersedia sangat sempit dan tidak mampu menampung evakuasi cepat dalam situasi darurat. Hal ini tentu saja memperburuk situasi jika kepanikan terjadi di antara narapidana saat gempa.

Kesiapsiagaan bencana juga terganggu oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana bagi petugas dan narapidana. Meskipun ada upaya pelatihan yang diberikan, tingkat pemahaman dan keterampilan yang dimiliki oleh narapidana dalam menghadapi bencana masih sangat minim. Narapidana belum dilibatkan secara aktif dalam simulasi evakuasi, dan petugas lapas pun belum sepenuhnya siap dalam mengelola proses evakuasi secara terorganisir dan cepat. Selain itu, penyediaan titik kumpul evakuasi di dalam lapas juga masih bermasalah. Titik kumpul yang berada di lapangan tengah lapas dilengkapi dengan kanopi sebagai peneduh, namun kondisi

kanopi ini berisiko roboh jika terjadi gempa besar, yang justru dapat menambah potensi korban jika tidak segera diperbaiki atau dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.

Kendala lainnya adalah terkait dengan infrastruktur lapas yang sudah tua. Bangunan lapas yang dibangun sejak masa penjajahan belum mendapatkan perbaikan signifikan. Akibatnya, bangunan ini rentan terhadap kerusakan parah jika terjadi gempa bumi dengan skala besar. Kondisi bangunan yang sudah tua, digabungkan dengan overkapasitas penghuni, membuat lapas menjadi lingkungan yang sangat rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi.

Strategi Kesiapsiagaan Bencana Alam Gempa Bumi dalam Rangka Menjamin Hak Hidup di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjungpati

1. Penyediaan Tempat Mitigasi Didalam Dan Diluar Lapas

Berdasarkan hasil observasi, strategi kesiapsiagaan bencana gempa bumi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati difokuskan pada perlindungan keselamatan dan hak hidup narapidana serta petugas. Salah satu elemen penting dalam strategi tersebut adalah penyediaan mitigasi bencana yang mencakup jalur evakuasi dan titik kumpul di dalam dan di luar lapas. Penyiapan jalur dan titik kumpul ini bertujuan untuk mengurangi risiko korban jiwa serta memudahkan proses penyelamatan jika terjadi gempa.

Pemilihan titik kumpul di dalam lapas dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kapasitas untuk menampung penghuni lapas secara aman. Salah satu lokasi titik kumpul yang dipilih berada di lapangan bulu tangkis yang biasa digunakan untuk kegiatan narapidana. Namun, keberadaan kanopi di area tersebut yang berfungsi melindungi dari cuaca ekstrem menimbulkan kekhawatiran jika gempa besar terjadi. Kanopi dapat menambah risiko bahaya jika struktur penopangnya tidak kuat, sehingga berpotensi roboh dan menimbulkan cedera atau kematian.

Meskipun kanopi memberikan manfaat dalam kondisi normal, evaluasi berkala terhadap kekuatan dan kestabilannya sangat diperlukan. Jika ditemukan potensi kerusakan pada struktur kanopi, perlu dilakukan perbaikan atau pemindahan titik kumpul ke area yang lebih aman. Selain itu, jalur evakuasi di dalam lapas menjadi kendala besar karena ruang yang terbatas. Jalur-jalur ini sempit sehingga membatasi pergerakan narapidana menuju titik kumpul yang aman, terutama saat situasi darurat seperti gempa yang menuntut evakuasi cepat.

Dalam keadaan darurat, jalur yang sempit memperlambat proses evakuasi secara signifikan. Hal ini diperburuk dengan kondisi kepanikan yang sering terjadi selama bencana, di mana narapidana mungkin merasa cemas dan kebingungan. Kepanikan semacam ini dapat memicu kekacauan, memperlambat proses evakuasi lebih lanjut, dan berisiko menimbulkan cedera fisik atau korban jiwa. Oleh karena itu, strategi kesiapsiagaan yang efektif harus mencakup pelatihan bagi petugas lapas agar mereka dapat mengelola evakuasi secara lebih teratur dan terkoordinasi dengan baik.

Titik kumpul di luar lapas juga telah disiapkan sebagai alternatif jika kondisi di dalam lapas dinilai terlalu berbahaya. Misalnya, jika terjadi kerusakan besar pada bangunan atau ancaman bangunan runtuh, evakuasi ke luar lapas menjadi pilihan terbaik. Namun, evakuasi ke luar lapas memiliki risiko tersendiri, terutama karena kemungkinan narapidana memanfaatkan situasi darurat untuk melarikan diri.

Oleh sebab itu, evakuasi ke titik kumpul luar lapas hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan dan harus berada di bawah pengawasan ketat dari petugas. Pengawasan yang cermat diperlukan agar narapidana tetap aman dan terkontrol selama proses evakuasi berlangsung. Pengaturan ini juga memastikan bahwa narapidana tidak melarikan diri, sekaligus menjaga keselamatan mereka dalam situasi yang tidak terkendali.

2. Sosialisasi bencana alam gempa bumi kepada narapidana lapas kelas IIB tanjungpati

Salah satu komponen kunci dalam strategi kesiapsiagaan bencana alam gempa bumi di Lapas Kelas II B Tanjung Pati adalah sosialisasi yang dilakukan oleh petugas dan narapidana, sesuai dengan Pedoman Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor Pas-30.OT.02.02 Tahun 2022. Pedoman ini memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil saat menghadapi bencana alam, khususnya gempa bumi, dengan tujuan untuk melindungi hak hidup narapidana dan petugas lapas. Sosialisasi ini mencakup penyuluhan tentang mitigasi bencana yang disampaikan oleh petugas lapas, dengan melibatkan partisipasi narapidana sebagai bagian dari proses edukasi.

Dalam kegiatan sosialisasi, narapidana diperkenalkan pada protokol evakuasi, termasuk cara bereaksi dengan cepat dan tenang saat gempa terjadi, mengenali tanda-tanda bahaya, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan diri. Jalur evakuasi yang telah ditentukan juga diperkenalkan kepada narapidana, diiringi dengan simulasi untuk memperkuat pemahaman mereka. Pedoman tersebut menekankan pentingnya keterlibatan aktif narapidana dalam upaya mitigasi bencana. Dengan berpartisipasi secara langsung, narapidana tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga belajar bagaimana bertindak sesuai prosedur saat bencana terjadi.

Penting untuk menekankan perlunya sosialisasi yang dilakukan sebelum bencana alam gempa bumi terjadi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas dan narapidana agar mereka memahami langkah-langkah yang harus diambil saat bencana melanda. Dengan sosialisasi yang tepat, dapat menghindari situasi fatal dalam menjaga hak hidup narapidana, meskipun terdapat keterbatasan lahan di lapas. Namun, sosialisasi ini dihadapkan pada beberapa tantangan, termasuk kurangnya pemahaman narapidana dalam mempersiapkan diri menghadapi strategi kesiapsiagaan bencana alam.

Oleh karena itu, petugas lapas perlu memastikan bahwa informasi dan pelatihan yang diberikan kepada narapidana disampaikan secara efektif, sehingga semua penghuni lapas memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi. Meskipun petugas hanya memberikan sosialisasi berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh secara mandiri, hal ini cukup membantu dalam menyebarkan informasi tentang bencana alam gempa bumi. Dengan adanya sosialisasi dan simulasi yang terstruktur, Lapas Kelas II B Tanjung Pati berharap dapat meningkatkan kesiapsiagaan semua penghuni lapas dalam menghadapi bencana gempa bumi, serta menjaga keselamatan dan hak hidup mereka.

3. Pengaturan kamar narapidana sesuai dengan tingkat kerentanan di lembaga pemasyarakatan.

Penempatan narapidana di Lapas Kelas II B Tanjung Pati dirancang dengan mempertimbangkan kerawanan terhadap gempa bumi. Sistem ini mengutamakan keselamatan narapidana rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus dengan menempatkan mereka di lokasi yang memudahkan proses evakuasi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa lorong-lorong sempit untuk evakuasi menjadi tantangan tersendiri.

Di beberapa lokasi, akses menuju titik berkumpul sangat terbatas, yang dapat menghambat pergerakan narapidana saat situasi darurat. Untuk mengatasinya, narapidana dengan keterbatasan fisik ditempatkan di kamar-kamar yang memiliki akses langsung ke jalur evakuasi dan dekat dengan titik berkumpul internal maupun eksternal. Sementara itu, narapidana dengan

kemampuan mobilitas yang baik dan respons cepat ditempatkan di area yang lebih jauh dari jalur evakuasi utama. Strategi penempatan ini merupakan langkah antisipasi bencana yang memadukan aspek keamanan dan kemudahan akses. Pengaturan ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses evakuasi dan meminimalisir risiko, terutama bagi kelompok narapidana yang paling rentan.

Anaisisis Teori Manajemen Strategi Menurut Fred R.David

1. Perumusan strategi

Perumusan strategi merupakan proses penting bagi setiap organisasi, karena mencakup penetapan visi dan misi yang jelas, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menilai kekuatan dan kelemahan internal, serta menetapkan tujuan jangka panjang. Pengembangan berbagai alternatif strategi dan pemilihan strategi yang paling tepat menjadi langkah tepat agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan baik. Proses ini juga melibatkan penentuan program dan bidang apa saja yang harus diprioritaskan untuk dilaksanakan. Tujuan akhir dari perumusan strategi adalah memastikan bahwa organisasi dapat merespons tantangan internal dan eksternal secara efektif, menyelaraskan sumber daya yang ada, serta mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Dalam perumusan strategi ini membuat perencanaan dalam menghadapi suatu permasalahan dimasa depannya.

Lapas kelas IIB Tajungpati merupakan daerah yang rawan bencana alam oleh karena itu dengan melaksanakan strategi kesiapsiagaan bencana alam gempa bumi agar menjadi lapas yang kuat dalam menghadapi bencana alam gempa bumi. Pencegahan terhadap risiko bencana alam, khususnya gempa bumi, yang berpotensi tinggi membahayakan lingkungan dan penghuni Lapas sangat penting untuk menjadikan Lapas tanjungpati tangguh terhadap bencana. Meskipun Lapas Tanjungpati telah melaksanakan perencanaan terkait mitigasi bencana. Langkah-langkah yang diambil meliputi simulasi, pembentukan tim tanggap darurat yang dilatih untuk menghadapi bencana alam. Tim tanggap darurat yang dibuat oleh lapas Tajungpati sesuai dengan surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Nomor : W.3.Pas.Pas.5-83.Pk.08.06 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Siaga Dan Tanggap Darurat Mitigasi Bencana dan berpedoman Dirjenpas Nomor Pas-30.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam di UPT Pemasyarakatan.

Pembentukan tim tanggap darurat ini merupakan salah satu dari perumusan strategi yang berperan dalam mengkoordinasi tindakan mitigasi saat terjadi gempa bumi. Tim tanggap darurat ini juga bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepda penghuni lapas sebagai tindakan yang arus dilakukan saat gempa bumi. Identifikasi Risiko dan Pemetaan Kerentanan Langkah pertama dalam perumusan strategi adalah melakukan identifikasi risiko dan pemetaan kerentanan bangunan serta area di dalam lapas. Ini mencakup analisis struktur bangunan lapas, lokasi, dan fasilitas pendukung seperti alat alarm atau lonceng. Lapas terdiri dari bangunan tua yang mungkin tidak memenuhi standar bangunan tahan gempa modern, sehingga penting untuk mengetahui area mana saja yang berisiko runtuh atau terkena kerusakan parah jika terjadi gempa. Berdasarkan observasi selama melaksaakan magang tentang kondisi lapas dapat menilai kerentanan struktur terhadap gempa bumi dan memberika arah atau rekomendasi terkait area yang digunakan sebagai titik aman bagi penghini lapas saat terjadinya bencana alam gempa bumi ini. Dengan perumusan strategi yang matang dan menyeluruh, Lapas Kelas II B Tanjungpati dapat lebih siap menghadapi bencana gempa bumi, melindungi keselamatan penghuni, dan menjamin hak hidup mereka secara maksimal dalam situasi darurat.

2. Implementasi strategi

Setelah melaksanakan perumusan strategi tentang kesiapsiagaan bencana gempa bumi di

lapas kelas. Implementasi memerlukan dukungan dari petugas dan narapidana agar dapat berjalan baik. Target utama pada implementas strategi ini adalah melaksanakan langkah-langkah praktis yang dirancang daam peumusan serta simulasi untuk seuruh penghuni lapas. Petugas menyediakan pengadaan dan fasilitas berupa tempat titik kumpul bagi narapidana jika terjadinya gempa bumi. Penyediaan ini berupa arah tujuan dimananya titik kumpul dilakukan jika terjadinya gempa bumi. Penyediaan lokasi titik kumpul dan jalur mitigasi agar narapidana bisa melaksanakan simulasi jika terjadinya bencana alam.

Lapas menyediakan area titik kumpul tetapi tidak di wilayah terbuka. Pada saat penelitian kekurangannya lapas belum bekerjasama dengan BPBD setempat tetapi petugas berusaha untuk dapat melakukan yang terbaik. Petugas melaksanakan simulasi dengan tujuan dilaksanakan agar paham akan prosedur evakuasi yang akan dilaksanakan dan mengetahui apa tindakan yang diambil pada saat gempa terjadi. Simulasi ini juga dilaksanakan mempertimbangkan jumlah penghuni dan jalur evakuasi yang ada. Dalam melaksanakan strategi yang baik, lapas dapat mempersiapkan kesiapsiagaan yang matang dalam menghadapi bencana alam, tujuannya agar bisa meningkatkan keselamatan dan ketertiban di dalam lapas serta menjamin hak hidup para penghuni dan petugas dengan meminimalkan risiko cedera atau kehilangan nyawa akibat bencana.

3. Evaluasi strategi

Evaluasi strategi kesiapsiagaan bencana alam gempa bumi di Lapas Kelas II B Tanjung Pati bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang telah dilaksanakan dan diimplementasikan mampu mencapai tujuan utama, yaitu menjamin hak hidup narapidana dan menjaga keselamatan mereka selama bencana. Proses evaluasi ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pengujian efektivitas strategi, pelaksanaan pengawasan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelatihan bagi narapidana serta petuga Mengingat bahwa banyak bangunan di Lapas Kelas II B Tanjung Pati adalah peninggalan zaman kolonial, struktur ini menjadi prioritas untuk diperiksa secara berkala. Pemeriksaan bangunan difokuskan pada identifikasi potensi kerusakan, retakan pada dinding atau struktur lain yang mungkin melemah akibat usia bangunan, serta mengevaluasi ketahanan terhadap gempa.

Bangunan yang rentan atau menunjukkan tanda-tanda kerusakan perlu segera diperbaiki atau diperkuat untuk mengurangi risiko runtuh saat gempa. Dengan demikian, pengecekan rutin ini memungkinkan petugas untuk mengambil langkah-langkah preventif dalam memperkuat struktur bangunan sebelum terjadinya bencana. Evaluasi pelatihan yang diberikan kepada narapidana dan petugas juga menjadi komponen penting dalam memastikan kesiapan menghadapi gempa bumi. Pelatihan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dapat meningkatkan pegetahuan peserta untuk lebih memahami protokol evakuasi, jalur evakuasi, serta tindakan yang harus diambil selama dan setelah bencana terjadi. Untuk mengukur efektivitas pelatihan ini, evaluasi melibatkan pengumpulan umpan balik dari para narapidana dan petugas yang berpartisipasi.

Umpan balik ini mencakup pendapat mereka tentang kelancaran prosedur evakuasi, apakah informasi dan instruksi sudah disampaikan dengan jelas, serta hambatan yang mungkin mereka alami selama simulasi. Selain itu, melalui evaluasi pelatihan, petugas dapat mengidentifikasi strategi-strategi yang berjalan efektif dan mengembangkan peningkatan berkelanjutan dalam program pelatihan. Evaluasi secara keseluruhan bertujuan untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil benar-benar efektif dalam melindungi narapidana, meningkatkan kesiapsiagaan lapas, dan mengurangi potensi risiko. Dengan melakukan evaluasi berkala, Lapas Kelas II B Tanjung Pati dapat terus memperbaiki strategi mitigasi bencana,

memperkuat bangunan, dan meningkatkan kesiapsiagaan personel serta penghuni lapas. Langkah-langkah ini penting agar, dalam situasi bencana, hak hidup narapidana tetap terjaga, dan keselamatan mereka dapat diprioritaskan tanpa mengorbankan keamanan fasilitas.

Analisis Teori Hak Asasi Manusia

1. Aspek Menghormati

Aspek menghormati dalam konteks hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan menekankan pada kewajiban negara untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak dasar narapidana, terutama hak hidup selama bencana alam. Dalam menghadapi situasi gempa bumi, negara harus memastikan bahwa kebijakan lapas menghormati kehidupan setiap individu tanpa diskriminasi. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan akses yang setara ke jalur evakuasi dan tempat mitigasi bagi semua narapidana, tanpa memandang latar belakang, jenis kejahatan, atau status kesehatan. Pedoman Dirjenpas No. PAS-30.OT.02.02/2022 menegaskan pentingnya menyediakan tempat mitigasi yang layak, aman, dan mudah diakses oleh semua narapidana, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik seperti lansia atau penyandang disabilitas. Sosialisasi prosedur evakuasi juga harus mencakup seluruh narapidana tanpa terkecuali, dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami.

2. Aspek Melindungi

Dalam aspek melindungi, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya aktif mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan menjamin keselamatan fisik serta psikologis narapidana, khususnya saat terjadi bencana alam. Di Lapas Kelas II B Tanjung Pati, hal ini direalisasikan melalui penyediaan infrastruktur mitigasi yang memadai, seperti tempat berkumpul di dalam dan luar lapas, serta jalur evakuasi yang layak. Mengingat bangunan lapas merupakan peninggalan kolonial, pemeliharaan dan evaluasi rutin terhadap kondisi fisik bangunan menjadi prioritas untuk mendeteksi potensi risiko. Pedoman Dirjenpas No. PAS-30.OT.02.02/2022 mewajibkan setiap UPT Pemasyarakatan untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi yang mengutamakan keselamatan penghuni. Strategi evakuasi yang efisien juga dikembangkan untuk mengantisipasi keterbatasan jalur evakuasi yang sempit.

3. Aspek Memenuhi

Kewajiban negara dalam aspek memenuhi mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin keselamatan narapidana. Di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati, meskipun tidak ada kerja sama dengan pihak luar, lapas tetap berupaya memenuhi standar keselamatan melalui upaya mandiri. Berdasarkan Pedoman Dirjenpas No. PAS-30.OT.02.02/2022, lapas menyediakan tempat mitigasi yang aman dengan kapasitas memadai. Tantangan overcrowding diatasi melalui optimalisasi penggunaan ruang dan jalur evakuasi yang tersedia. Pemantauan rutin kondisi bangunan dilakukan untuk memastikan keamanan struktur. Pelatihan dan simulasi evakuasi dilaksanakan secara berkala, melibatkan seluruh penghuni dan petugas lapas. Fasilitas pertolongan pertama dan medis darurat juga disediakan sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana. Sosialisasi intensif tentang prosedur penyelamatan diri dilakukan untuk memastikan setiap narapidana memahami tindakan yang harus diambil saat situasi darurat, dengan petugas lapas dibekali kemampuan untuk mengendalikan situasi dan mencegah kepanikan.

KESIMPULAN

Kesiapsiagaan bencana alam gempa bumi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpati mencerminkan komitmen yang kuat untuk menjamin hak hidup narapidana melalui

beberapa langkah mitigasi. Langkah-langkah ini meliputi penyediaan tempat mitigasi dan jalur evakuasi yang strategis, sosialisasi serta simulasi evakuasi bagi narapidana, dan pengaturan kamar berdasarkan tingkat kerentanan individu. Meskipun upaya ini penting, tantangan yang dihadapi juga cukup signifikan. Kondisi bangunan kolonial yang rentan, overcrowding narapidana yang dapat memperlambat proses evakuasi, serta kurangnya pemahaman dan pelatihan petugas dalam menghadapi situasi darurat menjadi hambatan utama. Untuk itu, diperlukan evaluasi berkala dan perbaikan infrastruktur serta peningkatan pelatihan bagi petugas agar kesiapsiagaan bencana dapat ditingkatkan secara efektif, sehingga keselamatan dan hak hidup seluruh penghuni lapas dapat terjamin dengan lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

David, F. R. (2011). Manajemen Strategi: Konsep dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Faizal Hamzah Lubis, F. P. H. H. (2021). Strategi Komunikasi Organisasi PK IMM FISIP UMSU Dalam Melaksanakan Program Kerja di Masa Pandemi Covid-19. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humani.

Firdaus, I., Pengkajian, P., Kebijakan, P., Penelitian, B., Hukum, P., Ham, D., & Rasuna, J. H. R. (1294). PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENANGANAN OVERCROWDED PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (The Role Of Corre ctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions). Direvisi, 6–11.

Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). At-Taqaddum, 8(1), 21–46.

Hesly E.Marentek. (2015). PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG BERLAKU. Lex Crimen, 4(8).

Istiqomah, Y., & Prajayanti, E. D. (2023). Gambaran Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Tentang Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Banjir. Jurnal Kebencanaan, 12(3), 123-134.

McMullan, K. (2011). Overcrowding and Emergency Response: Managing Disasters in Correctional Facilities. Journal of Disaster Management, 12(3), 112-126.

Murdhani, A. (2019). Analisis Resiko Bencana Gempa Bumi Serta Strategi Implementasi Sistem Informasi Manajemen untuk Mitigasi Bencana di Lombok Tengah. Jurnal Penanggulangan Bencana, 7(1), 45-60.

Risansaka, K., & Subroto, M. (2022). Menelaah Kesiapan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. Jurnal Ilmu Pemasyarakatan, 15(2), 87-99.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Tarigan, A., Meliala, E. M., & Siregar, S. A. (2022). Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hak Asasi Manusia, 8(4), 213-226.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.